



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6486-6495

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Perilaku Berkesadaran Hukum

Muhammad Wahyu Kusnaeni<sup>1✉</sup>, Ajar Dirgantoro<sup>2</sup>, Andreas Andrie Djatmiko<sup>3</sup>

Universitas Bhinneka PGRI

Email: [muhamadwahyuu8@gmail.com](mailto:muhamadwahyuu8@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sejak kurun waktu sekitar lima tahun kebelakang di Tulungagung banyak terjadi kasus kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh siswa yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penguatan Civic Disposition untuk meningkatkan perilaku berkesadaran hukum dikalangan siswa. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum siswa SMP Negeri 1 Pucanglaban terhadap tata tertib sekolah dapat meningkat melalui penguatan civic disposition yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis data dalam bentuk kata- kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Sumber data pada penelitian ini yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Guru Pendidikan Pancasila, dan 10 Siswa SMP Negeri 1 Pucanglaban, serta teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Civic Disposition dapat meningkatkan perilaku berkesadaran hukum terhadap tata tertib dikalangan siswa terutama dalam membentuk kedisiplinan dan sikap tanggung jawab pada siswa sehingga nilai- nilai dalam *Civic Disposition* dapat tertanam dalam diri siswa dan mampu memahami akan aturan yang telah ditetapkan sehingga siswa menjadi paham akan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.

Kata Kunci: *Civic Disposition*, *Pendidikan Pancasila*, *Perilaku Berkesadaran Hukum*

## Abstract

Since the past five years in Tulungagung, there have been many cases of legal violations caused by students who are still in junior high school. This research aims to find out how to strengthen civic disposition to increase legal awareness behavior among students. The formulation in this research is how students' legal awareness of SMP Negeri 1 Pucanglaban regarding school rules and regulations can be increased through strengthening the civic disposition in the Pancasila Education subject. This type of research is qualitative research with a descriptive approach, namely data analysis in the form of words, sentences or paragraphs expressed in descriptive form with three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing, The data sources in this research are the Deputy Principal for Student Affairs, Pancasila Education Teacher, and 10 Pucanglaban 1 Public Middle School students, as well as data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the research show that strengthening Civic Disposition can increase legal awareness behavior towards rules and regulations among students, especially in forming discipline and responsible attitudes in students so that the values in Civic Disposition can be embedded in students and are able to understand the rules that have been set so that students become understand the rights and obligations as citizens.

Keywords: *Civic Disposition, Pancasila Education, Legal Awareness Behavior*

## PENDAHULUAN

Salah satu dari banyak masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah nasionalisme dan nilai-nilai bangsa yang hilang atau menurun di kalangan remaja. Faktor internal, yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan, pergaulan, dan keluarga, membuat remaja rentan untuk melakukan perilaku kenakalan pada usia muda. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang melanggar norma, aturan, atau hukum masyarakat yang dilakukan saat remaja atau saat transisi dari anak-anak ke dewasa. kenakalan remaja sebagai gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh jenis pengabaian sosial yang mendorong mereka untuk mengembangkan perilaku menyimpang. (Dadan Sumara dkk, 2017).

Untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi bangsa, diperlukan suatu pembaharuan integral yang mengintegrasikan nilai-nilai identitas bangsa. Pada setiap bidang studi dalam kurikulum, pendidikan karakter dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai bidang studi harus dikembangkan, dieksplisitkan, dan dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. (Hikmah Eva, 2019) Pendidikan memungkinkan pembaharuan ini, pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memiliki nilai strategis untuk kelangsungan hidup manusia di Bumi dalam jangka panjang. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan mencakup berbagai upaya, dari pengembangan kepribadian yang kuat dan kohesif hingga peningkatan keterampilan teknis. Ini juga mencakup upaya kreatif dan spiritual. Berbagai kegiatan, termasuk memelihara nilai, pengembangan pekerjaan, nilai-nilai agama, studi dan pelatihan nilai modal, dan lain-lain, berkontribusi pada pembentukan karakter melalui pendidikan. (Susanto, 2016). Pada pembelajaran Pendidikan Pancasila kompetensi dasar atau yang disebut kompetensi minimal, terdiri dari tiga jenis: pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan (*civic skill*) demokrasi, hak asasi manusia dan Masyarakat Madani; kedua kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM. (Nuryadi dan Tholib, 2017).

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang sarat isi dengan nilai-nilai pancasila untuk membentuk kepribadian. Pendidikan Pancasila tidak cukup hanya sampai pada penghafalan, melainkan Pendidikan Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa dalam bentuk perbuatan, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bukan untuk dihafal melainkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu mengutamakan perilaku. (Fadil, Dkk. 2014)

Setiap bangsa dan negara mengakui arti pentingnya pembangunan karakter bangsa (*national character building*) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu bangsa-negara (*nation-state*). Perihal menunjang pembentukan karakter warga negara yang baik (*good citizens*) tidak bisa dilepaskan dari pembinaan karakter atau watak warga negara. Pembinaan karakter berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Untuk membangun norma sosial dalam masyarakat, pembinaan karakter yang mulia harus dilakukan dan diterapkan sejak dini. Terutama masyarakat Indonesia, yang sejak lama telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki adat atau kepribadian ketimuran. (Budiarto, 2020). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ajar Dirgantoro (2016), pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan

sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain.

Menurut Diana Owen dalam Latipa dkk, (2022). civic disposition adalah rasa peduli akan hak dan kesejahteraan orang lain, berlaku adil kepada siapa saja tanpa terkecuali, peka terhadap lingkungan sekitar, saling menghormati dan menghargai, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. *Civic disposition* atau yang bisa diartikan dengan watak atau karakter yang komitmen dalam memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan. Civic disposition menurut Quigley, dkk (1991) dalam Fusnika (2014) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menunjang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Watak kewarganegaraan seseorang berkembang secara bertahap sebagai hasil dari apa yang mereka alami dan pelajari di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat umum. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurlita dkk. (2019).

Pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghargai, taat hukum, dan watak atau karakter bangsa (civic disposition) termasuk keinginan untuk menjadi negara yang demokratis, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Namun, fakta saat ini menunjukkan yang sebaliknya. Ketika demokrasi yang diharapkan penuh dengan etika berubah menjadi demokrasi yang kebablasan dan menjurus pada anarkisme, kesantunan sosial politik semakin memudar di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kecerdasan kehidupan bangsa yang ditanamkan oleh para pendiri negara semakin hilang, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa semakin hilang.

Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setia warga negara adalah kesadaran hukum, yang berarti tidak ada konflik dalam masyarakat. masyarakat dalam kehidupan harus seimbang, selaras, Walaupun ada pengekangan perundang-undangan dari luar manusia atau masyarakat sendiri, kesadaran hukum dalam konteks ini dianggap sebagai kesadaran. (Zalfa. 2022). Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. (Iba Nurkasihani. 2018)

Namun sejak kurun waktu sekitar lima tahun kebelakang di Tulungagung banyak terjadi kasus kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh siswa yang masih duduk

dibangku sekolah menengah pertama, hal tersebut diperkuat oleh berita yang dikutip pada Tribunjatim.com yang diakses pada tanggal 2 februari 2024 jam 20.30 WIB melalui laman website <https://jatim.tribunnews.com>, mewartakan satlantas polres tulungagung datangkan siswa terduga pelaku balap liar dan orang tuanya, dari 10 anak yang ditangkap, 5 orang masih duduk dibangku SMP dan 5 orang lainnya duduk dibangku sma.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam menanamkan watak kewarganegaraan pada remaja sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Sekolah harus menjadi tempat dan wadah untuk menumbuhkan civic disposition siswa melalui pembudayaan karakter di lingkungan mereka, sesuai dengan peran pendidikan tersebut. Karena budaya menggambarkan bahwa segala sesuatu dilakukan sebagaimana mestinya tanpa merasakan beban untuk melakukannya, desain budaya sekolah harus mempertimbangkan elemen-elemen yang ada di lingkungan sekolah agar proses pendidikan tidak dirasakan sebagai beban

Penguatan civic disposition sebagai penerus generasi bangsa mempunyai peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) unggul berkarakter bangsa Indonesia, yang menjadi bekal dalam pembangunan karakter bangsa. Peran pendidikan sangat penting dalam pembentukan sifat warga negara yang baik. Pendidikan umumnya adalah upaya untuk menumbuhkan karakter dan kekuatan batin yang baik dan kecerdasan pada setiap orang. Dalam hal ini, pendidikan berarti bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh untuk membentuk pribadi siswa sehingga mereka dapat selaras dengan dunianya. Tidak boleh dipisahkan untuk mencapai kesempurnaan.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada keterkaitan civic disposition dengan perilaku berkesadaran hukum. Beberapa penelitian terdahulu sudah membahas keterkaitan civic disposition dengan pendidikan karakter namun tidak dengan perilaku berkesadaran hukum. selain itu, penelitian terdahulu yang membahas mengenai perilaku berkesadaran hukum yang diberkaitan dengan civic disposition masih sangat jarang dilakukan sehingga berangakat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat topik civic disposition atau watak kewarganegaraan yang berfokus pada peningkatan perilaku berkesadaran hukum pada siswa pada jenjang SMP.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk pengumpulan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian rasional adalah jenis penelitian yang menggunakan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berarti mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah. Penelitian menggunakan penelitian sebagai alat utama, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, dan analisis data menekankan pentingnya generalisasi. (Sugiono, 2016)

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Kualitatif memperlihatkan sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Sementara dikatakan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulas, diatur dengan eksperimen atau test. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumen, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian hingga penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat menguatkan *civic disposition* itu kembali agar dapat menjadikan siswa yang memiliki sifat dan perilaku untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Dalam penguatan *civic disposition* ini mengacu kepada karakter privatnya yang mendirikan sifat tanggung jawab dan disiplin diri agar para siswa memiliki karakter sebagai warga negara yang baik. sebagai seorang tenaga pendidik mereka sudah berupaya memberikan edukasi tentang aturan-aturan, nilai-nilai dalam kewarganegaraan dan menjelaskan kepada siswa kewajiban untuk mematuhi tata tertib yang ada di dalam sekolah, serta aturan-aturan agar para siswa dapat disiplin ketika di dalam lingkungan sekolah, dan memberikan gambaran mengenai konsekuensi jika melanggar tata tertib sehingga siswa dapat bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Pada penyusunan RPP yang berdimensi Civic Disposition hampir sama dengan penyusunan RPP pada materi yang lain. Namun, pada setiap materi yang diajarkan telah dimasukan materi mengenai penguatan karakter karena dalam kurikulum Merdeka Belajar dalam penyusunan RPP harus mencantumkan minimal dua point dari Profil Pancasila misalnya disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, bertaqwa kepada Tuhan dan lain sebagainya.

Karakter privat tanggung jawab dan disiplin diri memang benar-benar ditanamkan pada siswa di SMP Negeri 1 Pucanglaban, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh sekolah menuntut siswa untuk disiplin dengan mentaati tata tertib di sekolah, dan apabila ada siswa yang melanggarnya maka akan ditindak langsung oleh pihak sekolah. Hal ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Karakter privat yang terbangun melalui penguatan Civic Disposition adalah tanggung jawab dan disiplin diri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan kewajibannya dan perwujudan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja. Disiplin diri adalah kemampuan untuk membuat diri melakukan apa yang harus dilakukan, tidak peduli apa yang disukai atau tidak disukai. Rasa tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Rasa tanggung jawab juga berarti bahwa orang melakukan apa yang mereka lakukan sebagai bukti kesadaran akan kewajibannya. Namun, disiplin diri adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh sekolah menuntut siswa untuk disiplin dengan mentaati tata tertib di sekolah, dan apabila ada siswa yang melanggarnya maka akan ditindak langsung oleh pihak sekolah. Hal ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat.

Karakter kewarganegaraan yang dimiliki siswa khususnya dalam kesadaran hukum terhadap tata tertib siswa tergolong cukup baik. Dan kemudian ditemukan beberapa siswa yang memiliki nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang tergolong rendah padahal secara idealita guru mata pelajaran telah memberikan pengetahuan kewarganegaraan dan ketrampilan kewarganegaraan pada siswa. Berdasarkan dari itu pemahaman terkait pentingnya penguatan civic disposition harus dimiliki oleh seluruh siswa, dikarenakan faktor penghambat utama pada penerapan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan karakter kewarganegaraan yang ada di SMP Negeri 1 Pucanglaban terletak pada kebiasaan siswa itu sendiri, dimulai dari karakter yang telah terbentuk dari SD yang masih terbawa hingga SMP, dan juga faktor dari teman sebayanya yang mempengaruhi perubahan perilaku menuju yang lebih baik dalam diri siswa terhambat, tidak hanya itu kebiasaan sebelum pembelaaran dimulai masih menjadi fokus utama dari pihak guru, karena ketika guru masuk kedalam kelas, sangat sering dijumpai kelas tersebut masih berantakan dan kerapian dari siswa itu juga masih harus sering diingatkan oleh guru. Terlepas dari itu, pihak sekolah maupun guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila telah berupaya untuk memberikan edukasi kepada siswa. Pihak sekolah juga sudah menegakkan peraturan tata tertib yang telah disetujui oleh siswa tersebut ketika diawal diterima di SMP Negeri 1 Pucanglaban dan hal tersebut ditegaskan apabila ada siswa yang melanggar maka akan

langsung diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh siswa tersebut.

Upaya yang dilakukan pihak sekolah yakni dengan menerapkan beberapa kegiatan pembiasaan pembentukan karakter yang terus menerus dilakukan, dimulai dari kegiatan SILABAN NJAWANI dimana setiap warga sekolah diwajibkan berbahasa Jawa yang dilakukan setiap hari Jumat, ada pula kegiatan yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran jam pertama dimulai dengan menerapkan sekolah sehat yakni melakukan senam dasar sebelum memulai KBM yang dipimpin atau diinstruksikan oleh guru mata pelajaran pada jam pertama, serta dalam kegiatan keagamaan, dilakukan kegiatan rutin setiap hari Jum'at tadarus Alqur'an untuk seluruh siswa siswi yang bergama Muslim dan sholat dhuhur yang dilakukan secara bergilir setiap harinya. Selain himbauan yang diberikan oleh pihak sekolah, guru mata pelajaran juga telah memberikan edukasi yang cukup luas. Memberikan informasi mengenai pentingnya disiplin dan mematuhi tata tertib karena juga berperan penting terhadap pertumbuhan karakter pada siswa sendiri. Upaya tersebut dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan materi patuh terhadap norma pada kelas VII. Pada penerapan beberapa upaya kegiatan yang telah dilakukan terdapat hambatan yang dilalui, hambatan utama yang dihadapi terletak pada kebiasaan siswa itu sendiri yang terbawa dari kebiasaan yang dilakukannya ketika masih duduk di jenjang Sekolah Dasar, namun hambatan tersebut tergantung bagaimana menyiasatinya, selain dari kegiatan yang telah diupayakan dari pihak sekolah, setiap guru juga mempunyai cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat gap atau kesenjangan antara idealita dan realita yang terjadi. Nilai-nilai yang ditanamkan tidak hanya diajarkan secara materi, tetapi juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut untuk membangun karakter siswa sebagai warga negara yang baik. *Civic disposition* (watak atau karakter kewarganegaraan) merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang didalamnya meliputi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terlebih dahulu agar memiliki karakter kewarganegaraan yang baik. Untuk memiliki karakter yang mapan dan melekat dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, keterampilan berpikir, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dimensi sosial. Hal ini yang perlu dilakukan penguatan agar terbentuk karakter kewarganegaraan agar terbentuk siswa siswi yang memiliki karakter kewarganegaraan yang patuh akan aturan serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.



## SIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan civic disposition melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan perilaku kesadaran hukum siswa di SMP Negeri 1 Pucanglaban. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara langsung kepada waka kesiswaan, guru Pendidikan Pancasila, dan siswa, serta dari dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan civic disposition melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat meningkatkan kesadaran hukum tata tertib terutama pembentukan kedisiplinan dan sikap tanggung jawab serta saling menghargai pada siswa di SMP Negeri 1 Pucanglaban karena nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik.

Pendidikan Pancasila sendiri mempunyai peranan penting dalam menguatkan civic disposition (karakter kewarganegaraan) pada siswa, seperti mengubah kebiasaan ketika masih di sekolah dasar yang terbawa hingga ke jenjang SMP, tidak hanya itu Pendidikan Pancasila yang didalamnya memuat materi penekanan pada pentingnya mematuhi norma-norma, mempunyai dampak positif untuk meningkatkan kepatuhan siswa terhadap tata tertib yang ada di sekolah, hal tersebut juga menunjang civic disposition atau karakter kewarganegaraan pada siswa terbentuk. Civic disposition merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang didalamnya berisi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sehingga mereka dapat mengembangkan keinginan untuk menjadi warga negara yang demokratis, menghargai, dan taat hukum, yang merupakan sifat yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto G. (2020). Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. *Pamator Journal*, 13(1), 50-56.
- Dadan Sumara, O., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM* (Vol. 4, Issue 2).
- Dirgantoro Ajar. (2016). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 2, No 1

- Eva Trisnantari, H. (2019) Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Karakter Dengan Sistem Full Day School (FDS). *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol 9 No 1
- Fadil, Dkk. (2014). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Siswa. *Jurnal PPKN UNJ Online*, Volume 1, Nomor 2.
- Fusnika, F. (2016). Pembinaan civic disposition berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah tinggi ilmu Kesehatan kota sukabumi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1).
- Latipa, Dkk. (2022). Pembentukan Civic Disposition Pada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota singkawang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol 11. No 7. Halaman 507 - 518
- Nurkasihani, Iba. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Pelaihari <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>
- Nurlita, dkk. (2019). Implementasi program penguatan pendidikan karakter di Sekolah untuk meningkatkan civic disposition siswa. *Untirta Civic Education Journal*, 4(1), 67–88.
- Nuryadi, Tolib. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta. Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud
- Qonitah, Zalfa. (2022). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Mata Pelajaran PPKN Untuk Mencegah Perilaku Bullying Siswa. *Skripsi(S1) thesis*, FKIP UNPAS. <http://repository.unpas.ac.id/58529/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, E. (2016). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Civic Disposition Siswa Sma N Se-Kota Bandar Lampung *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang*, (Vol. 1, Issue 1).